

**PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN
MODIFIKASI SEPEDA MOTOR**

(DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG)

Beni Karia Rahmawa, Dr. Rian Sacipto,SH.,MH

Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo Ungaran

Benikariarahmawan10@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum dapat menciptakan tertib berlalu lintas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas perlu ditegakkan. Modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan bagaian dari pelanggaran lalu lintas modifikasi kendaraan bermotor diwajibkan memiliki izin sebagaimana persyaratan dalam peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya kendaraan modifikasi berbasis klasik yang menjadi trend dikalangan anak muda. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, adapun latar dari penelitian ini adalah Satlantas Polres Semarang sebagai ojek penelitian dan Kanit Dikyasa Satlantas Polres Semarang sebagai informan. Wawancara mendalam digunakan oleh peneliti dalam menjawab suatu dugaan kebenaran yang masih sementara dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada kendaraan modifikasi dilakukan dengan 3 cara pre-emptif dilakukan dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, preventif menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan, represif dilakukan dengan cara oprasi untuk menindak pelaku pelanggaran. kendala dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pelanggaran, Lalu lintas, Modifikasi kendaraan

Abstract

Law enforcement can create an orderly traffic, the application of legal sanctions against traffic violators needs to be enforced. Modifications that are not in accordance with the regulations are part of a traffic violation. Modification of motorized vehicles is required to have a permit as stipulated in Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The current phenomenon is the rise of classic-based modified vehicles that are becoming a trend among young people. This research is a type of legal research, the research uses qualitative research methods with an empirical approach, while the background of this research is the Semarang Police Satlantas as the research taxi and the Head of Dikyasa of the Semarang Police Satlantas as informants. In-depth interviews are used by researchers in answering an allegation of truth that is still tentative with descriptive analysis techniques. The results of this study note that in tackling traffic violations on modified vehicles, it is carried out in 3 ways, pre-emptive is done by educating and empowering the community to order traffic, preventive cooperation with the Department of Transportation, repressive is done by way of oprasi to take action against perpetrators of violations. Obstacles in overcoming traffic violations against motorists who modify include the lack of legal awareness of the community in orderly traffic.

Keywords: Law enforcement, Violations, Traffic, Vehicle modification